

Tanggal : 02 OKTOBER 2025

## PENGAWASAN PLENO TERBUKA REKAPITULASI PDPB TRIWULAN III TAHUN 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Kamis, 2 Oktober 2025, di Aula Kantor KPU HSS.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses rekapitulasi data pemilih berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.

### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan langkah strategis untuk menjaga validitas data pemilih sepanjang tahun. Kegiatan ini dilakukan secara periodik oleh KPU dengan melibatkan Bawaslu sebagai lembaga pengawas, guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih, sementara yang tidak memenuhi syarat dapat segera dicoret dari daftar pemilih.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu HSS menempatkan pengawasan terhadap PDPB sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi pelanggaran hak pilih serta bentuk tanggung jawab menjaga integritas proses demokrasi di tingkat lokal.

## B. PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI PDPB

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Polres Hulu Sungai Selatan, dan Kodim 1003 Kandangan. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan hadir melalui Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang bertugas memantau jalannya pleno serta memastikan proses penyampaian data oleh KPU berlangsung transparan.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu HSS turut memberikan masukan terkait pentingnya perluasan kategori data pemilih yang dimutakhirkkan serta kejelasan informasi mengenai pemilih baru dan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS). Bawaslu menekankan bahwa proses pemutakhiran perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar kualitas daftar pemilih dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

## C. HASIL REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Berdasarkan Berita Acara Nomor 28/PP.07-BA/6306/2025 tertanggal 2 Oktober 2025, jumlah total pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebanyak 179.239 pemilih, terdiri dari 89.249 pemilih laki-laki dan 89.990 pemilih perempuan, yang tersebar di 11 kecamatan dan 148 desa/kelurahan.

Bawaslu mencatat bahwa KPU HSS telah melakukan pembaruan data berdasarkan koordinasi dengan Disdukcapil, meskipun masih diperlukan peningkatan sinkronisasi data antarinstansi untuk memastikan tidak ada pemilih ganda atau data tidak valid.

## D. TANGGAPAN DAN KOORDINASI ANTARINSTANSI

Dalam rapat pleno tersebut, sejumlah instansi memberikan pandangan dan dukungan terhadap pelaksanaan PDPB.

1. Perwakilan Polres Hulu Sungai Selatan menyampaikan saran agar setiap kegiatan terkait PDPB dapat diinformasikan terlebih dahulu sehingga pihak kepolisian bisa ikut memantau dan memberikan pendampingan.

2. Kodim 1003 Kandangan menyampaikan bahwa meski belum sepenuhnya memahami teknis PDPB, pihaknya siap menerima data dan memberikan dukungan di lapangan bersama Polres.
3. Kesbangpol Hulu Sungai Selatan mengapresiasi koordinasi yang baik antarinstansi sehingga pelaksanaan PDPB tidak menimbulkan permasalahan yang kompleks. Kesbangpol juga menyatakan dukungan penuh terhadap KPU dan berharap koordinasi ini terus berjalan dengan baik.
4. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan menyampaikan bahwa data kependudukan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: penduduk yang baru berusia wajib KTP, mobilitas pindah datang, serta kematian. Disdukcapil juga mengakui adanya penurunan capaian perekaman KTP dari 99,95% menjadi 95% karena banyak remaja usia 16–17 tahun belum melakukan perekaman. Untuk mengatasinya, Disdukcapil melaksanakan program jemput bola di lapangan.
5. Komisioner KPU HSS, Siddiq, menjelaskan bahwa tidak ada kategori lain yang dimutakhirkan karena berdasarkan hasil rapat daring dengan KPU RI, pelaksanaan PDPB disesuaikan dengan kemampuan anggaran di masing-masing daerah. Terkait koordinasi dengan pihak rutan, KPU menyebut hal tersebut dilakukan melalui KPU Provinsi mengingat data tersebut belum dianggap mendesak. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki data dari Kemendagri agar segera terbarui.
6. Kassubag Data KPU HSS, Rusma, menambahkan bahwa pada Triwulan IV KPU akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan PDPB. Menurutnya, PDPB dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki data pemilih, meningkatkan akurasi data, dan memantik partisipasi aktif masyarakat.

## E. LANGKAH PENGAWASAN DAN PENEGASAN BAWASLU HULU SUNGAI SELATAN

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Langkah pengawasan akan difokuskan pada validasi data hasil pleno, uji petik lapangan, dan peningkatan koordinasi dengan Disdukcapil, KPU, serta pihak keamanan dan pemerintahan daerah.

Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Henry, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap data pemilih bukan hanya bersifat administratif, namun juga merupakan bagian penting dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Bawaslu mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Data pemilih yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus memastikan setiap proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi," tegas Henry.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan sinergi lintas lembaga, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya menjaga agar proses demokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berjalan dengan baik, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.